BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mendorong kemandirian, efisiensi, serta efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep desentralisasi pemerintahan ini secara mutlak menuntut hadirnya desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah bukan sekadar gambaran kemampuan teknis dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, mengelola sumber pendapatan, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang memiliki kinerja keuangan baik ditandai oleh tingginya derajat kemandirian fiskal, fleksibilitas pengalokasian anggaran, serta kemampuan dalam menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan tanpa bergantung secara dominan pada alokasi anggaran nasional.

Namun demikian, realita pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Lhokseumawe masih dihadapkan pada berbagai persoalan *structures* yang kompleks. Sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh yang pernah menjadi pusat pertumbuhan industri, Kota Lhokseumawe sejatinya memiliki potensi sumber daya ekonomi yang relatif beragam. Meski demikian, potret pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe masih menunjukkan dinamika yang belum optimal. Fenomena utama yang mengemuka dalam pengelolaan PAD adalah adanya ketimpangan kontribusi antar-sektor penerimaan internal.

Struktur penerimaan PAD Kota Lhokseumawe saat ini didominasi oleh sektor Pajak Daerah, sementara kontribusi dari sektor Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (seperti Badan Usaha Milik Daerah/BUMD), serta Lain-Lain PAD yang Sah masih sangat terbatas dan cenderung mengalami stagnasi. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor penerimaan menunjukkan bahwa diversifikasi sumber pendapatan daerah belum berjalan secara efektif. Di sisi lain, fenomena belum optimalnya capaian potensi PAD ini juga dipicu oleh adanya kendala tata kelola di lapangan, seperti masih maraknya celah kebocoran potensi penerimaan (*lost opportunity*) pada sektor retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), lemahnya pendataan dan pengawasan objek pajak/retribusi, serta kinerja BUMD lokal yang belum mampu memberikan kontribusi deviden yang signifikan terhadap kas daerah. Permasalahan-permasalahan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal murni

Kota Lhokseumawe masih rapuh dan belum sepenuhnya mampu dijadikan tumpuan utama pembiayaan daerah.

Di samping persoalan optimalisasi pendapatan internal melalui PAD, kinerja keuangan Kota Lhokseumawe juga sangat dipengaruhi oleh pasokan dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari alokasi dana transfer pusat yang bersumber dari penerimaan Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) nasional yang dibagihasilkan kembali kepada daerah penghasil maupun daerah pemerataan. Dalam konteks Kota Lhokseumawe, penerimaan DBH menghadapi fenomena ketidakpastian dan kerentanan akibat tren alokasi dari pusat yang fluktuatif serta cenderung mengalami penurunan sepanjang beberapa periode anggaran terakhir.

Perubahan kebijakan pengalokasian anggaran di tingkat nasional, dinamika harga komoditas sumber daya alam global, serta penyesuaian formula pembagian transfer daerah menjadi faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Selain itu, sifat umum pengalokasian DBH yang kerap diikat oleh ketentuan penggunaan khusus (*earmarked*) membatasi diskresi dan ruang gerak Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memanfaatkan dana tersebut untuk program-program prioritas lokal secara mendesak. Kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap instrumen dana transfer seperti DBH menempatkan ketahanan APBD Kota Lhokseumawe pada posisi yang rentan terhadap risiko kejutan fiskal (*fiscal shock*) apabila terjadi penurunan alokasi secara mendadak dari pusat.

Kombinasi antara tantangan internal dalam penggalian potensi PAD dan dinamika eksternal fluktuasi penerimaan DBH tersebut bermuara pada persoalan

kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. Derajat kemandirian fiskal Pemerintah Kota Lhokseumawe masih berada pada kriteria yang sangat rendah, di mana porsi pendapatan murni daerah belum mampu menutupi kebutuhan belanja daerah tanpa ditopang oleh dana transfer. Keterbatasan ruang fiskal ini berimplikasi langsung pada terbatasnya alokasi belanja modal yang produktif untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Fenomena ketimpangan struktur penerimaan PAD, kerentanan alokasi DBH, serta implikasinya terhadap derajat kemandirian keuangan daerah ini menegaskan adanya *gap* antara kondisi ideal desentralisasi fiskal dengan kenyataan di lapangan. Memahami sejauh mana instrumen pendapatan murni daerah dan penerimaan transfer pusat memengaruhi kinerja keuangan daerah yang diproksikan melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjadi isu mendasar yang sangat krusial untuk dikaji secara ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Periode 2020-2025"**. Berdasarkan seluruh uraian fenomena dan permasalahan dalam latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe periode 2020-2025?

2. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe periode 2020-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe periode 2020-2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe periode 2020-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu memajukan ilmu akuntansi di sektor publik, terutama dalam bidang keuangan daerah dan proses desentralisasi fiskal. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi empiris tentang dampak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin membahas topik yang sama, tetapi dengan menggunakan variabel, objek, atau waktu penelitian yang berbeda, sehingga dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang kemampuan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) secara lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini bertujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai cara pengelolaan keuangan daerah, agar masyarakat lebih memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang publik.